



Kerusuhan Pulau Rempang: Penilaian Aksiologis Terhadap Konflik Dalam Sudut Pandang Nilai Etika & Sosio-Politik

Alia Nurafifah, Joan Jessica Ringoringo, Sheila Ramadiva

Universitas Indonesia

Abstract

Received: 08 Juli 2024

Revised: 17 Juli 2024

Accepted: 23 Juli 2024

Proyek Rempang Eco-City merupakan proyek strategis berskala nasional yang direncanakan dengan tujuan untuk memajukan ekonomi negara Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lainnya, salah satu dari contohnya merupakan Singapura. Dalam pelaksanaannya, terjadi bentrokan yang tumbuh menjadi konflik antara warga dan aparat yang bersangkutan terkait dengan hak mereka atas tanah yang disinggahi, kekhawatiran pencemaran lingkungan, dan ancaman keberlangsungan pekerjaan mereka. Dilakukannya analisis menggunakan sudut pandang aksiologis cabang nilai etika dan nilai sosio-politik bertujuan agar kasus ini dapat dimengerti bukan hanya mencerminkan konflik atas tanah, namun juga melibatkan konflik nilai etika dan nilai sosial-politik yang terkait.

Keywords: Rempang, Aksiologi, Nilai Etika, Nilai Sosio-Politik.

(*) Corresponding Author: alia.nurafifah24@gmail.com, joanringoringo@gmail.com, anandasela.234@gmail.com

How to Cite: Nurafifah, A., Ringoringo, J., & Ramadiva, S. (2024). Kerusuhan Pulau Rempang: Penilaian Aksiologis Terhadap Konflik Dalam Sudut Pandang Nilai Etika & Sosio-Politik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 106-115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13354996>

PENDAHULUAN

Aksiologi adalah salah satu dari tiga cabang filsafat yang terdiri dari Ontologi, Epistemologi, serta Aksiologi. Cabang filsafat ini berfokus pada nilai dan dapat juga disebut dengan *theory of value*. Asal usul terminologi kata aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana *axion* memiliki arti nilai atau juga dapat diartikan sebagai norma, dan *logos* memiliki arti ilmu. Dalam ilmu aksiologi, nilai digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan suatu ilmu pengetahuan.

Dalam sudut pandang Suriasumantri (2009), aksiologi memiliki pengertian sebagai suatu teori yang memiliki kaitan dengan kegunaan dan berasal dari suatu pengetahuan yang diperoleh. Pada dasarnya, pentingnya aksiologi dapat dilihat dari bagaimana ilmu ini dapat digunakan sebagai suatu cara dalam bagaimana menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait nilai dari suatu peristiwa ataupun permasalahan. Basis itu akan digunakan sebagai salah satu cara untuk mencerna kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang. Kasus ini tidak hanya mencerminkan pertentangan fisik terkait tanah, tetapi juga melibatkan konflik nilai dalam pembangunan yang seharusnya bertujuan untuk mendorong ekonomi daerah.

Dilakukannya analisis ini dapat memperkaya pembahasan yang mendalam dari sudut pandang nilai dan memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dengan digunakannya sudut pandang nilai etika dan nilai sosial politik. Relevansi dari dibahasnya topik kerusuhan Pulau Rempang dapat dititikberatkan pada upaya untuk mencari solusi yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dari

analisis yang dilakukan menggunakan sudut pandang nilai etika serta sosial politik yang terdapat pada cabang ilmu filsafat aksiologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis aksiologis cabang nilai etika dan nilai sosio-politik. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konflik yang melibatkan nilai-nilai etika dan sosio-politik dalam konteks Proyek Rempang Eco-City.

PEMBAHASAN

Landasan Teori

Menurut pendapat Bramel, aksiologi diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu *moral conduct*, *aesthetic expression*, dan *socio-political life*. Dalam ketiga bidang ini, bidang *moral conduct* atau tindakan moral mencetuskan disiplin khusus yaitu etika. *Aesthetic expression* atau bidang ekspresi keindahan melahirkan disiplin khusus yang disebut dengan estetika. Bidang yang terakhir, *socio-political life*, melahirkan adanya filsafat kehidupan sosial politik. Etika, atau yang dapat juga disebut sebagai filsafat moral (*moral philosophy*), berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang memiliki arti watak. Sementara itu, kata "moral" diambil dari bahasa Latin "mos" atau "mores"; memiliki pengertian tingkah laku, cara hidup, kebiasaan, dan watak (Hamersma, 1985). Moral atau etika dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai kesusilaan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) mendefinisikan kata etika menjadi tiga makna. Yang pertama, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik, benar, serta mencakup hak dan kewajiban moral. Kedua, etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral. Ketiga, etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang dianut oleh suatu komunitas atau organisasi. Menurut KBBI (2003), moral dijelaskan sebagai ajaran yang diterima umum mengenai benar dan salah dari segi akhlak; budi pekerti dan susila; dan suatu mentalitas yang dapat mendorong seseorang untuk terus bersifat berani, berdisiplin, bersemangat, tabah, dan lainnya. Selain itu, Suseno (1993) menyatakan bahwa moralitas selalu berkaitan dengan aspek baik dan buruk individu sebagai manusia. Dengan konteks ini, kata baik dan buruk yang digunakan tidak mengacu pada profesi atau pekerjaan individu layaknya dosen, guru, pemain bulutangkis, atau ustadz/ustadzah, tetapi mengacu pada kondisi manusia.

Moral dan etika terkadang didefinisikan sebagai teori mengenai perilaku manusia, yaitu baik dan buruk. Perilaku yang secara moral benar dan salah tetapi masih tunduk pada akal sehat. Moral adalah keyakinan bahwa perilaku manusia, baik dan buruk, ditentukan oleh keadaan tertentu. Menemukan cara untuk mengevaluasi perilaku manusia (baik dan buruk) adalah tujuan dari etika, tetapi etika menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa terlepas dari karakteristik setiap orang, ukuran baik dan buruknya perilaku manusia berbeda-beda (relatif). Meskipun demikian, secara garis besar, etika bertujuan untuk mengidentifikasi standar moral yang dapat

ditegakkan oleh semua negara di dunia ini; tidak semua perilaku manusia dapat dinilai menggunakan standar etika, dan oleh karena itu perilaku yang dilakukan oleh seseorang tidak semuanya sama dalam hal menerima sanksi etika. Selanjutnya adalah nilai filsafat politik. Nilai aksiologi membentuk yang namanya *socio-political life* yang berarti filsafat politik. Ilmu politik dan filsafat politik bukanlah hal yang sama; perbedaannya terletak pada filsafat dan ilmu pengetahuan. Secara tradisional tidak ada perbedaan. Secara tradisional mengacu pada ide-ide yang dikemukakan oleh para filsuf kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles serta para pemikir politik kontemporer seperti Hobbes dan Machiavelli. Pemisahan filsafat dan sains yang semakin meningkat disebabkan oleh revolusi ilmiah yang dimulai pada abad ke-16 dan 17. Filsafat dimaksudkan sebagai ilmu teoritis, sedangkan sains biasanya dimaksudkan sebagai disiplin ilmu empiris. Pemisahan antara sains dan filsafat muncul selama berabad-abad berikutnya.

Dalam bahasa Inggris, filsafat politik diterjemahkan sebagai *political philosophy*. "Filsafat" menggambarkan model atau pendekatan wacana sebagai objek formal. Sementara itu, "politik" adalah objek material yang sedang dibahas tersebut. Jadi, filsafat politik membahas semua hal yang berbau politik. Sebaliknya, "ilmu politik" membahas masalah-masalah politik secara langsung dari sudut pandang ilmiah, serta pendekatan-pendekatan ilmiah terhadap tujuan-tujuan politik. Oleh karena itu, objek formal, atau dimensi filosofis dari diskusi, adalah apa yang membedakan filsafat politik dari ilmu politik. Lebih jauh lagi, filsafat politik dan pemikiran politik secara umum tidaklah sama. Kehidupan politik sangat erat kaitannya dengan pemikiran politik, yang kemudian difokuskan pada penegasan taktik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Meskipun demikian, filsafat politik berasal dari pengalaman politik yang sebenarnya dalam beberapa hal.

Filsafat politik mengkaji masalah-masalah politik dalam kerangka kerja yang luas. Dengan kata lain, filsafat politik lebih tertarik pada isu-isu seperti apakah sistem hukum di Indonesia telah memengaruhi keadilan atau apakah cita-cita politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejalan dengan cita-cita kemanusiaan.

Rangkuman Kasus

Pembangunan Kawasan Industri Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam, telah memicu suatu ketegangan hubungan yang terjadi antara warga setempat dengan aparat pemerintah. Meskipun pada dasarnya proyek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia terhadap negara-negara tetangga yang salah satunya merupakan Singapura. Selagi berjalannya proyek, terjadi pertentangan antara masyarakat dengan aparat yang bersangkutan akibat adanya ketidakpastian dari peraturan-peraturan terkait kepemilikan lahan yang ada di Indonesia secara keseluruhan, tidak terkecualikan tanah yang terdapat di Pulau Rempang. Akibat dari adanya ketidakpastian ini, masyarakat menganggap bahwa tanah yang mereka singgah di pulau tersebut sebagai milik mereka sendiri, sebagai sesuatu yang telah diwariskan tahun ke tahun oleh nenek moyangnya. Hal ini kemudian ditegaskan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar tidak memiliki Hak

Guna Usaha, karena pada dasarnya semua sudah dimiliki oleh Batam sebagai kota dan sosok otoritas.

Dalam rangka dijalkannya proyek ini, pembentukan tim yang terdiri dari berbagai aparat keamanan kemudian menerobos pemukiman warga pada tanggal 8 September 2023 untuk menandai kawasan yang terlibat. Penduduk setempat keberatan dan menolak proyek tersebut untuk menggunakan wilayah tempat tinggal mereka, terutama karena kekhawatiran akibat belum adanya penjelasan terkait kesejahteraan masyarakat setelah dilakukannya penggusuran. Proyek strategis nasional Rempang Eco-City mencakup pematokan lahan sebagai komponen dari proses pembangunan yang direncanakan. Tahap pertama proyek ini berfokus di Kampung Sembulang, Pulau Rempang, sebagai lokasi tujuan dibangunnya produksi kaca terbesar milik Xinyi Group dari Tiongkok. Penduduk Kampung Sembulang harus meninggalkan tempat tersebut paling lambat 28 September 2023.

Kemunculan tim gabungan pun menimbulkan pertentangan antara tim yang terdiri dari berbagai aparat yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar pada tanggal 7 September lalu di Jembatan 4, Galang, Kota Batam. Aparat keamanan sekitar mendorong mundur warga menggunakan gas air mata, bahkan mengenai sekolah, sehingga mengakibatkan beberapa siswa untuk dilarikan ke rumah sakit. Penduduk kemudian datang untuk menghadang petugas yang terlibat secara impulsif dan tidak teratur dengan tujuan untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Adanya tindakan pengambilalihan wilayah secara paksa kemudian menciptakan ingatan traumatis yang cukup signifikan bagi warga yang terlibat.

Pandangan Nilai Etika dan Sosio-Politik Terhadap Kasus

Untuk mengkaji kasus ini lebih lanjut, akan digunakan dasar pandangan ilmu aksiologi cabang nilai etika dan nilai sosio-politik. Berikut merupakan penjabarannya.

Pandangan Nilai Etika

Nilai etika merupakan suatu nilai yang sangat berkaitan dengan nilai moral. Menurut Mustafa, etika sendiri memiliki arti suatu kajian ilmu yang mengusut adanya suatu perilaku yang baik serta yang buruk dengan cara memperhatikan perbuatan manusia, serta sejauh apa yang diketahui oleh akal dan/atau pikiran manusia. Menggunakan poros etika ini, kita dapat menafsirkan dua sudut pandang, warga yang dirugikan serta negara yang diuntungkan dari dilaksanakan serta dijalkannya proyek Pulau Rempang ini. Jikalau dikaji dari sudut pandang warga setempat, proyek yang akan dilakukan dapat dianggap tidak etis, karena dianggap akan sangat merugikan kehidupan mereka sehari-hari. Kerugian-kerugian yang dialami oleh warga meliputi: adanya konflik sengketa tanah yang menimbulkan ancaman penggusuran warga, pelanggaran etika lingkungan karena adanya risiko pencemaran lingkungan yang akan mematikan habitat serta biota laut sekitar, serta adanya risiko hilangnya mata pencaharian nelayan yang akibat pencemaran lingkungan. Hal ini tentu akan menghasilkan konflik, mengingat bahwa mereka mempertaruhkan tempat tinggal, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan pekerjaan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aparat sekitar secara paksa memasuki wilayah penduduk untuk memasang patokan, yang kemudian dihadap oleh penduduk sekitar, hal itu kemudian bereskalasi menjadi konflik atau perseteruan yang dilakukan oleh

warga sekitar berupa bentrokan antara 16 kampung yang akan terdampak serta aparat terkait. Untuk menyelesaikan bentrokan tersebut, aparat sekitar memaksa mundur warga Rempang dengan melemparkan gas air mata, mengenai SDN setempat. Pemaksaan masuk pemukiman serta dengan pelemparan gas air mata memunculkan pertanyaan terkait etika serta moralitas hukum di Indonesia serta cara hukum tersebut ditegakkan; mengingat bahwa warga masih belum diberikan kepastian untuk keberlanjutan hidup sehari-hari mereka.

Dari sudut pandang pemerintah, proyek yang terkait akan menjadi salah satu sumber perekonomian negara berbentuk investasi yang besar. Dengan dijalankannya proyek ini, akan didapatkan keuntungan-keuntungan yang meliputi: pendapatan dari investasi yang diharapkan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan untuk mendongkrak ekonomi Indonesia, dan perkembangan daerah yang dapat menunjang pengembangan daerah Rempang terkait fasilitas, lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas SDM. Dampak-dampak positif ini dapat menjadi bukti moralitas pemerintah yang bertujuan untuk memajukan negara. Oleh karena itu, ada potensi bahwa sikap penolakan warga terhadap dijalankannya proyek ini dianggap sebagai hambatan upaya-upaya pemerintah dalam tujuan untuk memajukan ekonomi serta meningkatkan daya saing negara.

Di antara kedua sudut pandang ini, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki tolak ukur etika yang berbeda. Walau pemerintah memiliki tujuan yang bersifat positif dalam usahanya untuk memajukan negara, aksi pemerintah dalam cara untuk mendorong mundur demo yang dilakukan oleh warga dapat dianggap bertentangan dengan moral dan etika warga sekitar. Begitu juga dengan kebalikannya, bentrokan warga terhadap pemerintah terhadap usaha pemerintah untuk memajukan negara dapat dianggap bertentangan dengan moral dan etika yang dipegang oleh pemerintah sekitar.

Pandangan Nilai Sosio-Politik

Kasus ini juga dapat dikaji menggunakan dasar pandangan nilai sosio-politik. Indonesia sebagai negara menerapkan sistem politik demokrasi pancasila yang berdasarkan asas-asas dari pancasila; di mana pancasila terbentuk oleh beberapa sila yang tersusun dari sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga: persatuan Indonesia, sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan sila kelima yang berbunyi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, nilai-nilai yang terbentuk bersifat kekeluargaan dan gotong royong, serta menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kedaulatan rakyat, serta pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prinsip yang dipegang. Demokrasi memiliki beberapa unsur, di antara lain kebebasan keterlibatan rakyat dalam berpolitik, persamaan hak manusia, kebebasan merdeka warga negara, serta sistem perwakilan dan pemilihan berdasarkan mayoritas (Sargent, 1987). Dari apa yang sudah tertulis, dapat disimpulkan bahwa demokrasi pancasila yang diterapkan di Indonesia dibentuk dari rakyat, dibuat oleh rakyat, dan disusun untuk rakyatnya sendiri.

Sebelumnya, sudah dibahas terkait filsafat politik yang cenderung lebih membahas bagaimana sistem hukum di Indonesia telah memengaruhi keadilan atau apakah cita-cita politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejalan dengan cita-cita kemanusiaan; maka kasus ini dapat digunakan sebagai salah satu

contoh dari upaya aktualisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila. Upaya pemerintah untuk memajukan Indonesia sebagai negara untuk meningkatkan daya saing terhadap negara-negara tetangganya, seperti Singapura dan memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi sebagai pemenuhan pembukaan UUD 1945. Proyek Rempang Eco-City sebelumnya merupakan sebuah proyek yang tidak hanya memajukan ekonomi, tetapi diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang baru. Namun, proyek ini juga memiliki dampak negatif yang secara drastis yang dapat mengakibatkan berubahnya kehidupan warga sehari-hari, terkait tempat tinggal, kesehatan lingkungan, serta pekerjaan mereka. Ancaman yang *real* ini mengakibatkan adanya benturan konflik antara warga dan pemerintah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Akan tetapi, cara pemerintah untuk meredam konflik dapat dianggap sebagai kurang tepatnya aktualisasi dari politik demokrasi Pancasila karena tidak mencerminkan sila kelima yang berasaskan keadilan; terutama bagi warga Rempang yang memiliki kekhawatiran yang valid atas ancaman terhadap kelancaran dan kebiasaan hidup sehari-hari. Adanya pemaksaan untuk pemasangan patokan serta pelemparan gas air mata tanpa dilakukannya dialog bersifat damai bukan hanya merugikan pihak masyarakat saja, tetapi juga dapat merugikan pemerintah dengan cara mengecat pemerintah dengan nama yang buruk; mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk kedepannya. Maka dari itu, kasus Proyek Rempang Eco-City belum bisa dikatakan sebagai pemenuhan atau aktualisasi dari politik demokrasi Pancasila.

Solusi Berdasarkan Sudut Pandang Nilai Etika dan Nilai Sosio-Politik

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik konklusi bahwa kasus ini membutuhkan solusi yang dianggap dapat meredakan konflik dengan memikirkan nilai etika dan nilai sosio-politik yang dipegang oleh Indonesia.

Dalam penerapan solusi berdasarkan nilai etika, dapat dipertimbangkan pendekatan yang lebih mementingkan *environmental ethics* atau etika lingkungan, dikarenakan terdapat risiko pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu perairan dan biota yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pencegahan dan mengkaji ulang proyek ini dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya dan memikirkan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menggantikan kerusakan yang dihasilkan dari proyek yang akan dijalankan. Masih dalam lingkup etika, pemerintah juga melakukan pendekatan yang lebih bersifat humanis dan tanpa paksaan. Atas konflik dan kekhawatiran warga, pemerintah sekitar dapat melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi proyek dapat dilakukan dengan cara merangkul serta melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga aspirasi proyek ini dapat disampaikan secara maksimal.

Dalam penerapan solusi berdasarkan nilai sosio-politik, dalam perwujudan politik demokrasi Pancasila, pemerintah dapat menerapkan serta menjalankan proyek dengan menerapkan solusi berbasis keadilan dan lebih mendengarkan aspirasi warga. Atas konflik dan perseteruan yang sudah terjadi, sebagai respon pemerintahan menyampaikan bahwa penduduk dari Pulau Rempang tidak jadi

dialokasikan ke Pulau Galang, tetapi digeser ke daerah yang masih berada di dalam Pulau Rempang. Penduduk juga akan diberikan fasilitas tempat tinggal yang berukuran cukup, dilengkapi dengan air bersih, puskesmas, juga pelabuhan perikanan dan tidak mematikan pendapatan nelayan. Pemerintah menyatakan bahwa tempat tinggal tersebut disiapkan untuk sejumlah 700 kepala keluarga serta dibangun dalam kisaran waktu enam sampai dengan tujuh bulan; dengan kompensasi lainnya berbentuk uang, tempat tinggal sementara, serta perhitungan lainnya sebagai dukungan untuk mata pencaharian nelayan berupa keramba ikan dan sampan. Selain dari itu, masyarakat sekitar juga diberikan kesempatan untuk meraih beasiswa dan mendapatkan pelatihan konstruksi untuk lulusan SMA yang mau langsung bekerja. Hal ini merupakan salah satu dari usaha pemerintah untuk melakukan pengendalian situasi dengan menghindari digunakannya kekerasan; dilakukannya hal ini juga dapat mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar kembali dan meminimalisir konflik akibat adanya kemungkinan terjadi bentrokan-bentrokan untuk kedepannya, serta memastikan keberlangsungan proyek.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah melihat fenomena di Pulau Rempang dari perspektif aksiologis, dengan fokus pada nilai etika dan sosio-politik. Untuk memenuhi tujuan dari artikel ini, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap berbagai tindakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam fenomena di Pulau Rempang dan mengkaji dari segi nilai etika dan sosio-politik pada kajian aksiologi. Melalui analisis tindakan yang terjadi dan melibatkan pihak terkait, penelitian ini berusaha menemukan solusi untuk meredakan konflik antara warga Pulau Rempang dan aparat pemerintah.

Pembangunan Kawasan Industri Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam, telah memicu suatu ketegangan hubungan yang terjadi antara warga setempat dengan aparat pemerintah. Meskipun pada dasarnya, proyek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia terhadap negara-negara tetangga. Kemudian terjadilah pertentangan antara masyarakat dengan aparat yang bersangkutan akibat adanya ketidakpastian dari peraturan-peraturan terkait kepemilikan lahan yang ada di Indonesia, tidak terkecualikan Pulau Rempang. Akibat dari adanya ketidakpastian ini, masyarakat menganggap bahwa tanah yang mereka singgah tersebut sebagai milik mereka sendiri, sebagai sesuatu yang telah diwariskan tahun ke tahun oleh nenek moyangnya. Hal ini kemudian ditegaskan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar tidak memiliki Hak Guna Usaha, karena pada dasarnya semua sudah dimiliki oleh Batam sebagai kota dan sosok otoritas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam sudut pandang nilai etika terdapat dua sudut pandang, yaitu warga yang dirugikan serta negara yang diuntungkan dari dilaksanakan serta dijalankannya proyek Pulau Rempang ini. Dari sudut pandang warga setempat, proyek yang akan dilakukan dapat dianggap tidak etis, karena dianggap akan sangat merugikan kehidupan mereka sehari-hari yang meliputi: adanya konflik sengketa tanah yang menimbulkan ancaman pengusuran warga, pelanggaran etika lingkungan karena adanya risiko pencemaran lingkungan yang akan mematikan habitat serta biota laut sekitar, serta

adanya risiko hilangnya mata pencaharian nelayan yang akibat pencemaran lingkungan. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah, proyek yang terkait akan menjadi salah satu sumber perekonomian negara berbentuk investasi yang besar dan akan berpotensi menghasilkan keuntungan-keuntungan yang meliputi: pendapatan dari investasi yang diharapkan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan untuk mendorong ekonomi Indonesia, dan perkembangan daerah yang dapat menunjang pengembangan daerah rempang terkait fasilitas, lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas SDM. Solusi yang dapat diberikan berdasarkan nilai etika, dapat dipertimbangkan pendekatan yang lebih mementingkan *environmental ethics* atau etika lingkungan dengan melakukan pencegahan dan mengkaji ulang proyek ini dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya dan memikirkan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menggantikan kerusakan yang dihasilkan dari proyek yang akan dijalankan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pendekatan yang lebih bersifat humanis dan tanpa paksaan dengan melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan yang terlibat dan melakukan sosialisasi proyek dengan cara merangkul serta melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga aspirasi proyek ini dapat disampaikan secara maksimal.

Analisis dari segi sosio-politik menunjukkan upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia melalui proyek Kawasan Industri Rempang Eco-City di Pulau Rempang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi sebagai pemenuhan pembukaan UUD 1945. Namun, proyek ini menimbulkan dampak negatif yaitu memicu konflik dengan warga terkait tempat tinggal, kesehatan lingkungan, dan pekerjaan. Selain itu, pendekatan pemerintah untuk meredam konflik dianggap kurang mencerminkan keadilan, terutama bagi warga Rempang yang memiliki kekhawatiran valid. Sehingga, kasus Proyek Rempang Eco-City belum sepenuhnya mencerminkan aktualisasi politik demokrasi Pancasila. Solusi yang dapat diberikan berdasarkan nilai sosio-politik, mencakup penerapan keadilan, mendengarkan aspirasi warga, dan mengalokasikan penduduk dengan fasilitas yang memperhatikan kesejahteraan.

Saran

Melihat dari apa yang terjadi dalam proyek Rempang Eco-City dalam sudut pandang nilai etika dan sosio-politik dalam kebijakan, pemerintah disarankan tidak hanya melakukan pengkajian lebih lanjut terkait *environmental ethics* untuk mengurangi dampak lingkungan dari proyek yang akan dijalankan, tetapi juga melaksanakannya tanpa adanya penyimpangan dari rencana yang dianggap etis, juga memastikan bahwa tidak akan ada efek buruk jangka panjang yang dapat diakibatkan oleh Proyek Rempang Eco-City. Terkait pengalokasian warga yang terdampak ke daerah lain, pemerintah harus memastikan bahwa penduduk dijamin mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak dan bukan omong kosong belaka.

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga sangat penting karena apabila masyarakat merasa dilibatkan, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang akan dijalankan. Penekanan pada prinsip keadilan sosial, re-evaluasi Hak Guna

Usaha (HGU) untuk mengatasi ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang adil dan transparan, juga menjadi kunci dalam permasalahan ini sehingga masyarakat tidak akan merasa haknya direbut oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, untuk kedepannya pemerintah perlu melakukan pendekatan berbasis data untuk menentukan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Sehingga dapat menciptakan solusi yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dan mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. *KANAL (JURNAL ILMU KOMUNIKASI)*, 4 (2), Maret 2016, 187-204.
- Adikara, B. (2023, September 25). Konflik Pulau Rempang, Pengamat Ekonomi Paparkan Dampak yang Akan Dialami Indonesia dari Sisi Investasi. JawaPos.com. <https://www.jawapos.com/ekonomi/013018070/konflik-pulau-rempangpengamat-ekonomi-paparkan-dampak-yang-akan-dialami-indonesia-dari-sisi-investasi>
- Ardhi, S. (2023, September 25). Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat. [ugm.ac.id. https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/](https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/)
- Arief, A. (2023, September 26). Pemerintah Ganti Skema Relokasi Rempang, Batal Gusur ke Pulau Galang. [Katadata.co.id. https://katadata.co.id/ira/berita/651220b623c8d/pemerintah-ganti-skema-relokasi-rempang-batal-gusur-ke-pulau-galang?page=all](https://katadata.co.id/ira/berita/651220b623c8d/pemerintah-ganti-skema-relokasi-rempang-batal-gusur-ke-pulau-galang?page=all)
- Chantiequ, A. (2023, October 19). *Deretan Fasilitas untuk Peningkatan Rempang*. Antara News Kepri. <https://kepri.antaranews.com/berita/169446/deretan-fasilitas-untuk-peningkatan-sdm-rempang>
- Dewantara, A. W. (2017). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Sleman, DI Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hakim, I. (2023, September 30). *Nelayan Rempang khawatir Dampak Lingkungan Industri Kaca, Tim Amdal Akui Ada Dampak Negatif*. KOMPAS.tv. <https://www.kompas.tv/nasional/448049/nelayan-rempang-khawatir-dampak-lingkungan-industri-kaca-tim-amdal-akui-ada-dampak-negatif?page=all>
- Prayudhia, M. C. (2023, September 12). *Menteri ATR/BPN tegaskan lahan tinggal di Pulau Rempang tak miliki HGU*. www.antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/3724197/menteri-atr-bpn-tegaskan-lahan-tinggal-di-pulau-rempang-tak-miliki-hgu>
- Purnama, K. I. (2023, September 21). *3 Langkah Pemerintah dan Polri Selesaikan Konflik di Pulau Rempang*. <https://nasional.tempo.co/read/1774719/3-langkah-pemerintah-dan-polri-selesaikan-konflik-di-pulau-rempang>

- Putri, R. (2023, September 18). *Rempang Harus Kosong 28 September, Bahlil Beberkan Fasilitas yang Diterima 700 Warga Terdampak*.
<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012959032/rempang-harus-kosong-28-september-pemerintah-siapkan-1138-hunian-sementara-untuk-warga-terdampak>
- Sahputra, Y. (2023, September 11). *Kala Proyek Rempang Eco-city melaju, Warga Menolak Berhadapan Dengan Aparat*. Mongabay.co.id.
<https://www.mongabay.co.id/2023/09/11/kala-proyek-rempang-eco-city-melaju-warga-menolak-berhadapan-dengan-aparat/>
- Sorongan, T. P. (2023, September 19). *Ramai-Ramai Media Asing Sorot Lagi Pulau Rempang, Kenapa?*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230919134801-4-473704/ramai-ramai-media-asing-sorot-lagi-pulau-rempang-kenapa>
- Sulistiyawati, T. E. (2020). Perspektif Aksiologi Terhadap Penurunan Minat Belajar Anak di Masa Pandemi. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 33–43.
<https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i1.2>
- Yanwardhana, E. (2023, September 25). *Warga Rempang Tak Dipindah ke Pulau Galang, Cuma Geser Dikit*. www.cnbcindonesia.com.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230925150048-4-475347/warga-rempang-tak-dipindah-ke-pulau-galang-cuma-geser-dikit>
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 156–166. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>